



BAGIAN ANGGARAN 089



LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*)

**PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

NOMOR : KU.02/LPP- 177/JF/05/2024
TANGGAL : 8 MEI 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPKP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepala Pusat,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Iwan Agung Prasetyo
NIP 19740414 199402 1 001



	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi	8
A.4. Dasar Pengukuran	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	19
B.2. Belanja Negara	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
C.1. Aset Lancar	26
C.2. Aset Tetap	26
C.3. Aset Lainnya	29
C.4. Ekuitas	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	32
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	36
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
E.1. Ekuitas Awal	39
E.2. Surplus/(Defisit) LO	39
E.3. Transaksi Antar Entitas	39
E.4. Ekuitas Akhir	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	41
F.1. Informasi Biaya Bantuan Kedinasan	41
F.2. Informasi Dana Pinjaman Luar Negeri	41
F.3. Informasi Dana Hibah Luar Negeri	45

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	: Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2023 dan 2022	20
Tabel 2	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2023	21
Tabel 3	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2023	21
Tabel 4	: Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022	22
Tabel 5	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023	23
Tabel 6	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022	23
Tabel 7	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2023	24
Tabel 8	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022	24
Tabel 9	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	25
Tabel 10	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022	25
Tabel 11	: Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	26
Tabel 12	: Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	25
Tabel 13	: Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	27
Tabel 14	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023	29
Tabel 15	: Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	29
Tabel 16	: Rincian Beban Operasional TA 2023 dan 2022	32
Tabel 17	: Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022	33
Tabel 18	: Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022	33
Tabel 19	: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang Persediaan Tahun 2023 Menurut LO dan LRA	34
Tabel 20	: Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022	34
Tabel 21	: Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022	35
Tabel 22	: Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022	36
Tabel 23	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022	36
Tabel 24	: Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 dan 2022	37
Tabel 25	: Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok
 - A. Neraca Percobaan
 - B. Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Neraca
 - D. Laporan Operasional
 - E. Laporan Perubahan Ekuitas
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
4. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN
5. Daftar Persediaan – SIMAK BMN



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2023 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepala Pusat,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Iwan Agung Prasetyo
NIP 19740414 199402 1 001



- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSrE untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.



Pernyataan Tanggung



v -

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara s.d. 31 Desember 2023 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp13.810.950,00. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor tidak membuat estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara s.d. 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.579.755.542,00 atau mencapai 95,75 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp23.583.295.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.896.512.087,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp23.172.640,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp1.772.419.245,00, dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesar Rp1.100.920.202,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp0,00 dan Rp2.896.512.087,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp22.567.995.634,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp22.567.995.634,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp13.810.950,00, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp22.554.184.684,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp1.753.239.953,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp22.554.184.684,00, kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp23.697.456.818,00 sehingga Ekuitas Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp2.896.512.087,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

U R A I A N	CATA-TAN	TAHUN ANGGARAN 2023			TA 2022 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI THD ANGGARAN	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
■ Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	13.810.950	-	42.542.159
Jumlah Pendapatan		-	13.810.950	-	42.542.159
BELANJA	B.2				
Rupiah Murni		20.626.688.000	20.528.790.348	99,53	18.175.245.815
■ Belanja Pegawai		16.194.388.000	16.138.167.324	99,65	14.985.267.913
■ Belanja Barang		4.371.150.000	4.329.523.024	99,05	3.077.331.026
■ Belanja Modal		61.150.000	61.100.000	99,92	112.646.876
Pinjaman Luar Negeri		1.252.651.000	1.243.983.243	99,31	2.824.922.539
■ Belanja Pegawai		-	-	-	-
■ Belanja Barang		1.252.651.000	1.243.983.243	99,31	1.728.940.206
■ Belanja Modal		-	-	-	1.095.982.333
Hibah Luar Negeri		1.703.956.000	806.981.951	47,36	72.528.777
■ Belanja Pegawai		-	-	-	-
■ Belanja Barang		188.800.000	97.200.000	51,48	72.528.777
■ Belanja Modal		1.515.156.000	709.781.951	46,85	-
Jumlah Belanja		23.583.295.000	22.579.755.542	95,74	21.072.697.131
■ Belanja Pegawai	B.2.1	16.194.388.000	16.138.167.324	99,65	14.985.267.913
■ Belanja Barang	B.2.2	5.812.601.000	5.670.706.267	97,56	4.878.800.009
■ Belanja Modal	B.2.3	1.576.306.000	770.881.951	48,90	1.208.629.209

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepala Pusat,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Iwan Agung Prasetyo
NIP 19740414 199402 1 001



- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
 - Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSR.E untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.



II. NERACA

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2023	31 DES 2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
■ Persediaan	C.1.1	23.172.640	33.274.179
JUMLAH ASET LANCAR		23.172.640	33.274.179
ASET TETAP	C.2		
■ Peralatan dan Mesin	C.2.1	7.116.334.659	5.923.722.433
■ Akumulasi Penyusutan	C.2.2	(5.3439.15.414)	(4.770.343.586)
JUMLAH ASET TETAP		1.772.419.245	1.153.378.847
ASET LAINNYA	C.3		
■ Aset Tak Berwujud	C.3.1	1.889.112.550	1.889.112.550
■ Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.3.2	709.781.951	0
■ Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(1.497.974.299)	(1.322.525.623)
JUMLAH ASET LAINNYA		1.100.920.202	566.586.927
JUMLAH ASET		2.896.512.087	1.753.239.953
EKUITAS			
■ Ekuitas	C.4.1	2.896.512.087	1.753.239.953
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.896.512.087	1.753.239.953

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepala Pusat,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Iwan Agung Prasetyo
NIP 19740414 199402 1 001



III. LAPORAN OPERASIONAL

**PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2023	31 DES 2022
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1		
■ Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	0	0
Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1)	D.1.1	0	0
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2		
■ Beban Pegawai	D.1.2.1	16.138.167.324	14.985.267.913
■ Beban Persediaan	D.1.2.2	68.316.848	123.312.399
■ Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	1.336.189.809	1.788.755.437
■ Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	211.967.517	184.500.597
■ Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	4.064.333.632	2.827.165.342
■ Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	749.020.504	921.191.754
Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)		22.567.995.634	20.830.193.442
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1–D.1.2)		(22.567.995.634)	(20.830.193.442)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
SURPLUS/ (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.2.1.		
■ Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1.1	5.000.999	
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.2.2.		
■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2.1	8.809.951	42.542.159
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1)		13.810.950	42.542.159
SURPLUS / (DEFISIT) – LO (D.1+D.2)		(22.554.184.684)	(20.787.651.283)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepala Pusat,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Iwan Agung Prasetyo
NIP 19740414 199402 1 001



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2023	31 DES 2022
EKUITAS AWAL	E.1	1.753.239.953	2.007.898.407
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	E.2	(22.554.184.684)	(20.787.651.283)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3		
■ Ditagihkan ke Entitas Lain	E.3.1	22.579.755.542	21.072.697.131
■ Diterima dari Entitas Lain	E.3.2	(13.810.950)	(42.542.159)
■ Transfer Keluar	E.3.3		(497.162.143)
■ Transfer Masuk	E.3.4	1.131.512.226	0
Jumlah Transaksi Antar Entitas		23.697.456.818	20.532.992.829
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3)		1.143.272.134	(254.658.454)
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)	E.4	2.896.512.087	1.753.239.953

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepala Pusat,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Iwan Agung Prasetyo
NIP 19740414 199402 1 001



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

👤 Kepala Pusat	: Iwan Agung Prasetyo
👤 Koordintor Pengembangan Pembinaan dan Fasilitas	: Sindu Senjaya Aji
👤 Koordinator Sertifikasi dan Pengelolaan Data	: Achmad Julianto
👤 Koordinator Program dan Evaluasi	: Mutia Rizal
👤 Kepala Sub Bagian Umum	: Aries Sulastowo

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Seiring dengan pelaksanaan *roll out* SAKTI *full module* untuk seluruh K/L pada tahun 2022, maka pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja telah sepenuhnya menggunakan SAKTI kelompok modul pelaporan (modul persediaan, modul asset tetap, modul piutang, serta modul *general ledger* dan pelaporan/GLP)

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat

ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017

dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

**Penyusutan Aset
Tetap**

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang

dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan

tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2023 semula sebesar Rp21.432.754.000,00. Pada bulan Maret 2023 dilakukan revisi anggaran sehubungan adanya kegiatan yang didanai PHLN TA 2023 sebesar Rp1.037.754.000,00. Pada bulan Mei dilakukan revisi sehubungan optimalisasi anggaran dan tambahan anggaran hibah luar negeri sebesar Rp2.465.244.000,00. Pada bulan Agustus dilakukan revisi sehubungan penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp415.945.000,00 dan pengurangan anggaran belanja modal yang berasal dari hibah luar negeri sebesar Rp880.088.000,00. Pada bulan September dilakukan revisi sehubungan tambahan anggaran pinjaman luar negeri sebesar Rp333.697.000,00 sehingga anggaran setelah revisi menjadi Rp22.594.635.000,00. Pada bulan Oktober dilakukan revisi sehubungan pengurangan anggaran belanja pegawai sebesar Rp46.231.000,00. Pada bulan November dilakukan revisi sehubungan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) anggaran belanja dan saldo gaji & tunjangan *baseline* yang direvisi ke kantor pusat sebesar Rp1.044.891.000,00 dan *cost sharing* belanja barang sebesar Rp10.000.000,00 sehingga anggaran setelah revisi menjadi Rp23.583.295.000,00

Rincian Pagu Belanja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)			
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total Anggaran Belanja
Anggaran Semula	17.053.304.000	4.379.450.000	0	21.432.754.000
Tambahan Anggaran PLN	0	918.954.000	0	918.954.000
Tambahan Anggaran HLN	0	188.800.000	2.395.244.000	2.584.044.000
Optimalisasi anggaran, Tambahan anggaran HLN dan pengurangan	(2.273.521.000)	1.700.000	61.150.000	(2.210.671.000)
Tambahan pegawai dan pengurangan belanja modal HLN	415.945.000	0	(880.088.000)	(464.143.000)
Tambahan anggaran PLN	0	333.697.000	0	333.697.000
Pengurangan belanja pegawai	(46.231.000)	0	0	0
Tambahan Belanja Pegawai (ABT) dan Saldo Gaji & Tunjangan Baseline yang direvisi Ke Kantor Pusat serta <i>Cost Sharing</i>	1.044.891.000	(10.000.000)	0	0
Anggaran Akhir	16.194.388.000	5.812.601.000	1.576.306.000	23.583.295.000

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka perubahan belanja adalah sebagai berikut:

Program	Jumlah Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Program Pengawasan Pembangunan	2.983.000.000	5.939.607.000
Program Dukungan Manajemen	18.449.754.000	17.643.688.000
Total	21.432.754.000	23.583.295.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp13.810.950

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.810.950,00. Keseluruhan Pendapatan Negara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp28.731.209,00 atau 67,54 persen dibandingkan realisasi PNBP Tahun

2022 sebesar Rp42.542.159,00 disebabkan menurunnya Penerimaan Kembali Belanja TAYL.

Perbandingan realisasi PNBPN Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2023 dan 2022

Uraian Jenis PNBPN	Realisasi PNBPN (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	5.000.999	0	5.000.999	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42.542.159	(42.542.159)	(100)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	7.783.951	0	7.783.951	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.026.000	0	1.026.000	-
Total	13.810.950	42.542.159	(28.731.209)	(67,54)

- ✓ Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp5.000.999,00 berasal dari lelang penjualan BMN Peralatan dan Mesin dengan Risalah Lelang nomor 216/27/2023 dan dengan nomor NTPN 406018N3EA5Q455D berupa 26 unit PC, 14 unit Notebook, 8 unit Printer, 6 unit Scanner dan 8 unit External/Portable Hardisk dalam kondisi rusak berat.
- ✓ Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp7.783.951,00 merupakan pengembalian yang dilakukan oleh supplier atas selisih harga barang yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada pengadaan peralatan PC AIO Design iMac atas hasil pemeriksaan BPK.
- ✓ Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.026.000,00 merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor UAKPA yang diterima bendahara yang menduduki jabatan fungsional perbendaharaan atas hasil pemeriksaan BPK.

Realisasi Belanja
Negara
Rp22.579.755.542

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Tahun 2023 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp22.579.755.542,00 atau 95,75 persen dari anggaran

sebesar Rp23.583.295.000,00. Pengembalian belanja tahun 2023 sebesar Rp12.440.110,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2023

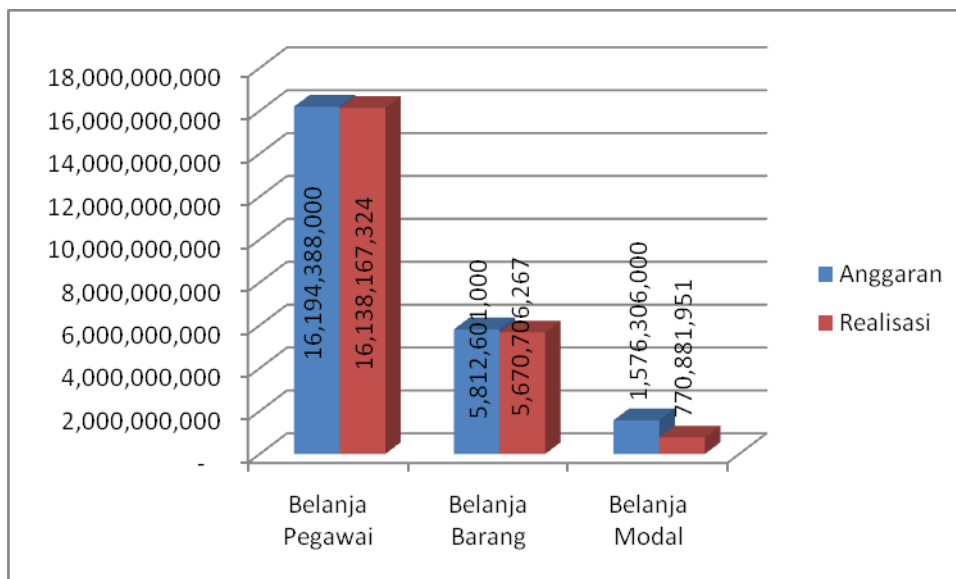
Kode Prog.	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
CH	Program Pengawasan Pembangunan	5.939.607.000	4.997.083.213	84,13
WA	Program Dukungan Manajemen	17.643.688.000	17.582.672.329	99,65
Jumlah		23.583.295.000	22.579.755.542	95,74

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja TA 2023

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	16.1943.88.000	16.138.167.324	99,65
52	Belanja Barang	5.812.601.000	5.670.706.267	97,56
53	Belanja Modal	1.576.306.000	770.881.951	48,90
Jumlah		23.583.295.000	22.579.755.542	95,74

Komposisi anggaran dan realisasi belanja disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 1
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Realisasi belanja TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.507.058.411,00 atau 7,15% dibandingkan realisasi belanja Tahun 2022 disebabkan meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
		TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	16.138.167.324	14.985.267.913	1.152.899.411	7,69
52	Belanja Barang	5.670.706.267	4.878.800.009	791.906.258	16,23
53	Belanja Modal	770.881.951	1.208.629.209	(437.747.258)	(36,22)
	Total	22.579.755.542	21.072.697.131	1.507.058.411	7,15

Belanja Pegawai
Rp16.138.167.324

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.138.167.324,00 dan Rp14.985.267.913,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunj PNS	6.696.919.000	6.647.590.602	99,26
Belanja Lembur	62.000.000	61.868.000	99,79
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	9.435.469.000	9.428.708.722	99,93
Total	16.194.388.000	16.138.167.324	99,65

Realisasi belanja pegawai (netto) sebesar Rp16.138.167.324,00 berasal dari belanja pegawai (bruto) sebesar Rp16.150.047.434,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp11.880.110,00.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2022, terdapat peningkatan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.152.899.411,00 atau 7,69 persen disebabkan adanya kenaikan pangkat dan jabatan pegawai serta kenaikan tunjangan kinerja pegawai yang mempengaruhi peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja .

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.647.590.602	6.910.458.446	262867844	3,80
Belanja Lembur	61.868.000	78.967.000	17.099.000	21,65
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	9.428.708.722	7.995.842.467	1.432.866.255	17,92
Total	16.138.167.324	14.985.267.913	1.152.899.411	7,69

Belanja Barang
Rp5.670.706.267

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.670.706.267,00 dan Rp4.878.800.009,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2023 disajikan

pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	484.292.000	482.788.641	99,69
Belanja Barang Non Operasional	664.728.000	648.201.168	97,51
Belanja Barang Persediaan	59.243.000	58.215.309	98,27
Belanja Jasa	305.100.000	205.200.000	67,26
Belanja Pemeliharaan	214.178.000	211.967.517	98,97
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.085.060.000	4.064.333.632	99,49
Total	5.812.601.000	5.670.706.267	97,56

Realisasi belanja barang (*netto*) sebesar Rp5.670.706.267,00 berasal dari belanja barang (*bruto*) sebesar Rp5.671.266.267,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp560.000,00.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2022, terdapat peningkatan realisasi Belanja Barang sebesar Rp791.906.258,00 atau 16,23 persen antara lain disebabkan meningkatnya belanja barang operasional, belanja jasa dan belanja perjalanan dinas sehubungan pelaksanaan tupoksi Pusbin JFA.

Perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	482.788.641	442.451.216	40.337.425	9,12
Belanja Barang Non Operasional	648.201.168	1.147.770.970	(499.569.802)	(43,53)
Belanja Barang Persediaan	58.215.309	80.400.933	(22.185.624)	(27,59)
Belanja Jasa	205.200.000	196.834.951	8.365.049	4,25
Belanja Pemeliharaan	211.967.517	184.176.597	27.790.920	15,09
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.064.333.632	2.827.165.342	1.237.168.290	43,76
Total	5.670.706.267	4.878.800.009	791.906.258	16,23

Dalam realisasi Belanja Barang TA 2023 sebesar Rp5.670.706.267,00 termasuk realisasi dari Pinjaman dan Hibah

Luar Negeri sebesar Rp1.243.983.243,00 atau 21,94% dari total realisasi Belanja Barang dan realisasi Hibah Luar Negeri sebesar Rp 97.200.000,00 atau 1,71% dari total realisasi Belanja Barang.

Belanja Modal
Rp770.881.951

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp770.881.951,00 dan Rp1.208.629.209,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2023 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.150.000	61.100.000	99,92
Belanja Modal Lainnya	1.515.156.000	709.781.951	46,85
Total	1.576.306.000	770.881.951	48,90

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, terdapat penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp437.747.258,00 atau 36,22 persen antara lain disebabkan lamanya proses pengadaan konsultan untuk *Development of AAPI Web-Based Peer Review* dan *Development of Online Learning Modules at AAPIs Enterprise Learning Management System*. Perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.100.000	582.808.009	(521.708.009)	(89,52)
Belanja Modal Lainnya	709.781.951	625.821.200	83.960.751	13,42
Total	770.881.951	1.208.629.209	(437.747.258)	(36,22)

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp770.881.951,00 telah dicatat sebagai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp61.100.000,00 dan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan sebesar Rp709.781.951,00.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp23.172.640

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp23.172.640,00 dan Rp33.274.479,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Aset Lancar	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1.	Persediaan	23.172.640	33.274.179
	Jumlah	23.172.640	33.274.179

Persediaan
Rp23.172.640

C.1.1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp23.172.640,00 dan Rp33.274.179,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kode	Jenis Persediaan	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
117111	Barang Konsumsi	23.172.640	76.509.645
	Jumlah	23.172.640	33.274.179

Persediaan senilai Rp23.172.640,00 berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp1.772.419.245

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.772.419.245,00 dan Rp1.153.378.847,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	7.116.334.659	5.751.971.853
	Akumulasi Penyusutan	(5.343.915.414)	(4.770.343.586)
	Nilai Buku	1.772.419.245	1.153.378.847

Peralatan dan
Mesin
Rp7.116.334.659

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp7.116.334.659,00 dan Rp5.923.722.433,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp1.772.419.245,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5.923.722.433
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	61.100.000
- Transfer Masuk	1.131.512.226
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	7.116.334.659
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(5.343.915.414)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.772.419.245

- ✓ Pembelian sebesar Rp61.100.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	HP Printer Ink Tank (Print, Scan, Copy) All In One	4	8.400.000
2.	Smart TV 65 Inch	1	12.500.000
3.	Interactive Whiteboard/Educatic	1	21.500.000
4.	Loker 4 Pintu	1	2.000.000
5.	Logitech Spotlight Pointer Presenter Advanced Wirekess/Bluetooth	3	5.100.000
6.	Logitech BCC950 Conference Cam	1	3.000.000
7.	Router	1	8.600.000
Jumlah		12	61.100.000

- ✓ Transfer Masuk sebesar Rp1.131.512.226.000,00 merupakan peralatan dan mesin yang diterima dari Biro Umum BPKP pada

bulan Desember tahun 2023, sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	P.C. Unit	17	307.832.226
2.	Notebook	44	823,680,000
Jumlah		61	1.131.512.226

- ✓ Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak dicatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp39.686.300,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	37.986.300
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	1.700.000
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	39.686.300
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(22.001.092)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	17.685.208

Pembelian sebesar Rp1.700.000,00 berupa realisasi belanja barang untuk 2 unit Voice Recorder.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp5.343.915.414)

C.2.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.343.915.414,00 dan Rp4.770.343.586,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	7.116.334.659	5.343.915.414	1.772.419.245
	Jumlah	7.116.334.659	5.343.915.414	1.772.419.245

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2022 (Rp)	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	4.770.343.586	5.343.915.414	573.571.828	573.571.828	0
	Total	4.770.343.586	5.343.915.414	573.571.828	573.571.828	0

Aset Lainnya
Rp1.100.920.202

C.3. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.100.920.202,00 dan Rp566.586.927,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	1.889.112.550	1.889.112.550
	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	709.781.951	0
	Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	(1.497.974.299)	(1.322.525.623)
	Nilai Buku	1.100.920.202	566.586.927

Aset Tak Berwujud
Rp1.889.112.550

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.889.112.550,00. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.497.974.299,00 dan Rp1.322.525.623,00. sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp391.138.251,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, berupa *Software* dan lisensi.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.889.112.550
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.889.112.550
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1.497.974.299)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	391.138.251

Aset Tak
Berwujud Dalam
Pengerjaan
Rp709.781.951

C.3.2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp709.781.951,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah	
- <i>Development of AAIPI Web-Based Peer Review</i>	302.700.000
- <i>Development of Online Learning Modules at AAIPIs Enterprise Learning Management System</i>	407.081.951
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	709.781.951

Mutasi tambah berupa *Development of AAIPI Web-Based Peer Review* dan *Development of Online Learning Modules at AAIPIs Enterprise Learning Management System*, sampai dengan akhir tahun 2023 masih dalam proses pengerjaan oleh konsultan yang bersumber dana dari hibah Multi Donor Trust Fund (MDTF).

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp1.497.974.299)

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.497.974.299,00 dan Rp1.322.525.623,00. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional kantor karena sudah dalam kondisi rusak berat, dan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset

tersebut. Saldo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri atas:

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.497.974.299	1.322.525.623
	Total	1.497.974.299	1.322.525.623

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2022	Saldo per 31/12/2023	Mutasi (Rp)	Beban Amortisa (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (6) - (5)
1	Akum Amort ATB	1.322.525.623	1.497.974.299	175.447.676	175.447.676	0
	Total	1.322.525.623	1.497.974.299	175.447.676	175.447.676	0

Ekuitas
Rp2.896.512.087

C.4. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.896.512.087,00 dan Rp1.753.239.953,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Operasional
(Rp22.567.995.634)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar minus Rp22.567.995.634,00 dan minus Rp20.830.193.442,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp22.567.995.634,00.

Pendapatan
Operasional
Rp0,00

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp0,00

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

Beban Operasional
Rp22.567.995.634

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp22.567.995.634,00 dan Rp20.830.193.442,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16
Rincian Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	16.138.167.324	14.985.267.913	1.152.899.411	7,69
Beban Persediaan	68.316.848	123.312.399	(54.995.551)	(44,60)
Beban Barang dan Jasa	1.336.189.809	1.788.755.437	(452.565.628)	(25,30)
Beban Pemeliharaan	211.967.517	184.500.597	27.466.920	14,89
Beban Perjalanan Dinas	4.064.333.632	2.827.165.342	1.237.168.290	43,76
Beban Penyusutan dan Amortisasi	749.020.504	921.191.754	(172.171.250)	(18,69)
Total	22.567.995.634	20.830.193.442	1.737.802.192	8,34

Beban Pegawai
Rp16.138.167.324

D.1.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.138.167.324,00 dan Rp14.985.267.913,00. Kenaikan Beban Pegawai tersebut karena adanya penambahan jumlah pegawai, mutasi dari unit lain BPKP ke Pusbin JFA serta adanya kenaikan pangkat dan jabatan pegawai.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17
Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	6.647.590.602	6.910.458.446	262.867.844	3,80
Beban Lembur	61.868.000	78.967.000	17.099.000	21,65
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	9.428.708.722	7.995.842.467	1.432.866.255	17,92
Total	16.138.167.324	14.985.267.913	1.152.899.411	7,69

Realisasi beban pegawai menurut LO Tahun 2023 sama dengan realisasi belanja pegawai menurut LRA pada periode yang sama.

Beban Persediaan
Rp68.316.848

D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp68.316.848,00 dan Rp123.312.399,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18
Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	68.316.848	123.312.399	(54.995.551)	(44,60)
Total	68.316.848	123.312.399	(54.995.551)	(44,60)

Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2023 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp58.215.309,00, sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar Rp68.316.848,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan selama Tahun 2023. Dengan demikian terdapat selisih sebesar

Rp10.101.539,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang Persediaan
Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Persediaan konsumsi	68.316.848	-	68.316.848
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	58.215.309	(58.215.309)
Total	68.316.848	58.215.309	10.101.539

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.336.189.809*

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.336.189.809,00 dan Rp1.788.755.437,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang Operasional	482.788.641	442.451.216	40.337.425	9,12
Beban Barang Non Operasional	648.201.168	1.147.770.970	(499.569.802)	(43,53)
Beban Jasa	205.200.000	196.834.951	8.365.049	4,25
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	1.698.300	(1.698.300)	(100)
Total	1.336.189.809	1.788.755.437	(452.565.628)	(25,30)

Realisasi menurut LO tahun 2023 sama dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama sebesar Rp1.336.189.809,00.

Beban
Pemeliharaan
Rp211.967.517

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp211.967.517,00 dan Rp184.500.597,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 21 berikut ini:

Tabel 21
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	211.967.517	184.176.597	27.466.920	14,89
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	324.000	(324.000)	(100)
Total	211.967.517	184.500.597	27.142.920	14,71

Realisasi menurut LO tahun 2023 sama dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp4.064.333.632

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.064.333.632,00 dan Rp2.827.165.342,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	3.194.124.178	1.717.392.489	1.476.731.689	85,99
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	196.875.000	303.980.000	(107.105.000)	(35,23)
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	235.797.000	471.452.250	(235.655.250)	(49,98)
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	437.537.454	334.340.603	103.196.851	30,87
Total	4.064.333.632	2.827.165.342	1.237.168.290	43,76

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sama dengan realisasi Belanja menurut LRA pada periode yang sama.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp749.020.504

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp749.020.504,00 dan Rp921.191.754,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	573.571.828	603.463.598	(29.891.770)	(4,95)
Beban Amortisasi Software	175.448.676	317.728.156	(142.279.480)	(44,78)
Total	749.020.504	921.191.754	(172.171.250)	(18,69)

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Rp13.810.950

D.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.810.950,00 dan Rp42.542.159,00. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp13.810.950,00 tersebut merupakan surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5.000.999,00 dan surplus dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya sebesar Rp8.809.951,00

Surplus/Defisit
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp5.000.999

D.2.1. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.000.999,00 dan Rp0,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5.000.999,00 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp0,00.

Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp5.000.999

D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.000.999,00 dan Rp0,00. Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5.000.999,00 merupakan penerimaan atas penjualan aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari lelang penjualan BMN Peralatan dan Mesin dengan Risalah Lelang nomor 216/27/2023 tanggal 10 Maret 2023.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan dari Pemindah-tanganan BMN Lainnya	5.000.999	-	5.000.999	-
Total	5.000.999	-	5.000.999	-

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp8.809.951

D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.809.951,00 dan Rp42.542.159,00. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp8.809.951,00 merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp8.809.951,00 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp8.809.951

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.809.951,00 dan Rp42.542.159,00.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42.542.159	(42.542.159)	(100)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.026.000	0	1.026.000	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	7.783.951	0	7.783.951	-
Total	8.809.951	42,542.159	(33.732.208)	(79,29)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp1.753.239.953

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.753.239.953,00,00 dan Rp2.007.898.407,00.

*Surplus/(Defisit)
LO*
(Rp22.554.184.684)

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar minus Rp22.554.184.684,00 dan Rp20.787.651.283,00. Defisit LO merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp22.554.184.684,00 dan surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp13.810.950,00 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

*Transaksi Antar
Entitas*
Rp23.697.456.818

E.3. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp23.697.456.818,00 dan Rp20.532.992.829,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	22.579.755.542	21.072.697.131
Diterima dari Entitas Lain	(13.810.950)	(42.542.159)
Transfer Masuk	1.131.512.226	0
Transfer Keluar	0	(497.162.143)
Total	23.697.456.818	20.532.992.829

*Ditagihkan ke
Entitas Lain*
Rp22.579.755.542

E.3.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp22.579.755.542,00 dan Rp21.072.697.131,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal neraca.

*Diterima dari
Entitas Lain*
Rp13.810.950

E.3.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.810.950,00 dan Rp42.542.159,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi

penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca.

Transfer Masuk
Rp1.131.512.226

E.3.3. Transfer Masuk

Jumlah Transfer Masuk per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.131.512.226,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset yang diterima dari satuan kerja di lingkungan BPKP, berupa Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagai berikut:

Satker Pengirim	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Biro Umum	1.131.512.226	0	1.131.512.226
Jumlah	1.131.512.226	0	1.131.512.226

Transfer Keluar
Rp0

E.3.4. Transfer Keluar

Jumlah Transfer Keluar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp497.162.143,00.

Ekuitas Akhir
Rp2.896.512.087

E.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.896.512.087,00 dan Rp1.753.239.953,00. Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp2.896.512.087,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp0,00.

*Biaya Bantuan
Kedinasan*

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Informasi Biaya Bantuan Kedinasan

Tidak terdapat realisasi dana penugasan dari pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2023.

F. 2 Informasi Data Pinjaman Luar Negeri

F.2.1. Latar Belakang

State Accountability Revitalization Additional Financing Project (STAR AF) ADB LOAN NO . 3872-INO merupakan proyek lanjutan kerjasama pemerintah Indonesia dan ADB yang dikelola oleh BPKP selaku Executing Agency (EA), dengan tujuan dalam rangka melanjutkan penguatan akuntabilitas sektor publik yang telah dilaksanakan sebelumnya selama periode Februari 2013 sampai dengan Maret 2020 melalui proyek STAR ADB Loan No. 2927-INO. Sumber daya manusia berkualitas di bidang pengelolaan keuangan negara dan internal audit yang terbangun pada proyek STAR sebelumnya akan didukung dengan pengembangan infrastruktur IT dalam mempercepat pelaksanaan proses bisnis pengelolaan keuangan dan internal audit. Selain itu, STAR AF juga bermanfaat untuk mengantisipasi tuntutan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baik dalam hal tata kelola, proses bisnis, monev, dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan demikian, fungsi pengelolaan keuangan negara dan audit internal dapat lebih terjamin dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah (Public Finance Management - PFM) yang bersih dan berkualitas.

F.2.2. Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan State Accountability Revitalization Additional Financing Project (STAR AF) ADB LOAN NO . 3872-INO selama periode 2020-2025 memiliki tiga komponen output, yaitu: (1) capacity of government's internal auditors and public finance officers developed; (2) competency and needs-based e-learning approach

institutionalized; dan (3) institutional strengthening through system improvement. Berkaitan dengan komponen output di atas, terdapat dua poin penting dari penyelenggaraan STAR AF, yang juga relevan dalam melanjutkan pemanfaatan capaian proyek STAR, yaitu:

1. Melanjutkan pengembangan inovasi yang mendukung penguatan peran pembinaan BPKP melalui penerapan organisasi pembelajar bagi APIP dan PKN yang selaras dengan kebutuhan organisasi publik dalam mencapai strategi dan tujuannya. Inovasi yang dimaksud adalah penyelenggaraan GIA Corpu. Capaian STAR berupa pengembangan dan penyelenggaraan Regol (registrasi online) dan e-learning yang merupakan bagian dari proses bisnis learning value chain (LVC) GIA Corpu pada tahap program delivery, dilanjutkan di STAR AF dengan pengembangan secara terintegrasi dari seluruh proses bisnis LVC GIA Corpu, mencakup: (1) learning need diagnostic (mencakup core competency analysis (CCA), developmental need analysis (DNA), training need analysis); (2) desain & pengembangan pembelajaran; (3) penyelenggaraan & implementasi pembelajaran melalui training dan sertifikasi JFA dan non JFA serta diklat teknis substansi; dan (4) evaluasi & pengukuran dampak pembelajaran. Selain itu, capaian STAR lainnya berupa hasil pengembangan SIBIJAK dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan training need analysis GIA Corpu, yaitu dengan memanfaatkan layanan pusat data auditor SIBIJAK untuk mengidentifikasi dan memetakan gap competency APIP tiap K/L/P secara terupdate.
2. Melanjutkan pengembangan inovasi yang mendukung penguatan peran pengawasan sektor publik, yaitu meningkatkan implementasi pengelolaan risiko dan memanfaatkan ICT dalam rangka mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeluaran sektor publik. Pengembangan pengelolaan risiko sektor publik yang didanai STAR AF ini selaras dengan peran BPKP dalam

melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan.

Pada pengawasan keuangan, penerapan pengelolaan risiko direalisasikan melalui pengembangan FMIS-NG yang berbasis web dan mengintegrasikan seluruh sub-sistemnya serta melengkapinya dengan pengembangan sistem continuous monitoring (CM) bagi user di first line dan second line dalam menerapkan pendekatan three lines of defense. Penerapan CM diharapkan akan meningkatkan process improvement pengelolaan keuangan sektor publik di level manajemen. Sementara, penerapan continuous audit (CA) untuk memastikan efektifitas pengelolaan risiko oleh manajemen K/L/P, sekaligus meningkatkan peran APIP sebagai third line, dilakukan melalui pengembangan data warehouse dan pengembangan sistem continuous audit (CA). Pengembangan sistem CA ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan data analytic di internal audit yang pada akhirnya meningkatkan business intelligence pengawasan sektor publik. Bagi BPKP, diharapkan dengan adanya pengembangan data warehouse FMIS NG dapat mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas big data SIMA dan meningkatkan penerapan business intelligence pengawasan BPKP atas pengelolaan pengeluaran keuangan pemerintah daerah secara nasional, serta memperkuat kualitas rekomendasi kepada Presiden RI.

Pada pengawasan program pembangunan, penyelenggaraan STAR AF diarahkan untuk meningkatkan penguatan Capaian STAR yang mencakup pedoman penerapan pengelolaan risiko untuk pemerintah daerah, serta pedoman pengawasan berbasis risiko. Dalam hal ini, capaian STAR dilanjutkan pemanfaatannya melalui: (i) pengembangan sistem informasi pengelolaan risiko yang selaras dengan enterprise architecture (EA) BPKP dan kebijakan SPBE nasional; (ii) pengembangan pengelolaan risiko pada program prioritas pembangunan

nasional 2020-2024; (iii) pengembangan pengukuran maturitas penerapan manajemen risiko sektor publik; dan (iv) pengembangan kompetensi teknis ICT dan pengelolaan risiko. Penerapan pengelolaan risiko pada program pembangunan diharapkan dapat meningkatkan penerapan performance-based budgeting (PBB) pada proses bisnis perencanaan-penganggaran yang berorientasi pada capaian outcome (hasil), dan peningkatan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di seluruh proses pengelolaan keuangan negara/daerah (PFM). Pada akhirnya, diharapkan penerapan pengelolaan risiko sektor publik dapat meningkatkan penerapan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pengeluaran keuangan pemerintah.

STAR AF diharapkan berkontribusi secara langsung melalui upaya-upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah sebagaimana tercermin dalam target Rencana Strategis BPKP dan RPJMN 2020-2024 dan diharapkan dapat memberikan dampak dalam peningkatan kualitas laporan keuangan baik pusat maupun daerah sebagaimana tertuang dalam Project Administration Manual (PAM) STAR AF, yaitu opini WTP BPK di tahun 2025 sebesar 97% untuk K/L, 97% untuk provinsi, 90% untuk kabupaten/kota; Indeks Maturitas SPIP level 3 di tahun 2025 sebesar 100% untuk K/L dan pemerintah daerah; dan Peningkatan indeks kapabilitas APIP level 3 di tahun 2025 sebesar 85% untuk K/L dan Pemerintah daerah.

F.2.3. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri BPKP

Data umum dari masing-masing satuan kerja penerima PHLN adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	LK PHLN
1	Nama PHLN	<i>State Accountability Revitalization Additional Financing Project (STAR AF)</i>
2	Pemberi Pinjaman	<i>Asian Development Bank (ADB)</i>
3	Nama Proyek	<i>State Accountability Revitalization Additional Financing Project (STAR AF)</i>
4	Loan ID	3872-INO
5	No. Register	17JE53EA
6	<i>Date Sign</i>	09 Desember 2019
7	<i>Date Effective</i>	15 Januari 2020
8	<i>Closing Date</i>	30 September 2015
9	<i>Loan Amount</i>	USD 90.000.000,00
10	<i>Disbursement s.d. 2023</i>	Rp4.221.813.641,00
11	<i>Disbursement pada tahun 2023</i>	Rp1.243.983.243,00
12	Belanja Tahun 2023 (Rupiah)/ Realisasi Netto	Rp1.243.983.243,00
	a. Belanja Pegawai	Rp0,00
	b. Belanja Barang	Rp1.243.983.243,00
	c. Belanja Modal	Rp0,00
	d. Belanja Bansos	Rp0,00
13	Neraca (Rupiah)	
	a. Aset Lancar	Rp0,00
	b. Aset Tetap	Rp479.881.403,00
	c. Aset Lainnya	Rp614.402.630,00
	d. Kewajiban	Rp0,00
14	<i>Executing Agency</i>	Sekretaris Utama BPKP
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK

F. 3 Informasi Data Hibah Luar Negeri

F.3.1. Latar Belakang

Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF) II yang dimulai pada bulan Maret 2016 dengan nilai *Grant Agreement* TF0A1903, sebesar USD 2,700,000, sepanjang perjalanan programnya telah melakukan realisasi penggunaan dana sebesar 81.11% atau sekitar USD 2,190,000 untuk membiayai 4 pilar Utama yang dijalankan oleh 7 Unit Kementerian/Lembaga. PFM-MDTF II dinyatakan selesai secara keseluruhan pada bulan Agustus 2020 dengan pemberian rating “*Satisfactory*” dalam laporan *Implementation Completion Report* (ICR) yang disusun bersama oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

Tiga jenjang rapat tahunan yang digelar sepanjang tahun 2020 yaitu rapat *Government of Indonesia – Management Committee Representatives* (Gol-MCR) pada bulan September 2020, rapat Management Committee (MC) pada bulan Oktober 2020 dan rapat *Partnership Council* (PC) pada bulan November 2020 telah menghasilkan keputusan untuk melanjutkan Proyek PFM-MDTF ke tahap III.

Proyek PFM-MDTF III dimulai dengan diberikannya persetujuan dan arahan langsung oleh Menteri Keuangan, saat memimpin rapat *Partnership Council* tanggal 11 November 2020. Sementara itu, pengesahan dinyatakan dengan terbitnya *Grant Agreement* dengan nomor TF0B5420 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Perwakilan Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Perwakilan negara Donor melalui Bank Dunia) pada tanggal 18 Mei 2021.

F.3.2. Tujuan dan Sasaran

Proyek PFM-MDTF III menitikberatkan pada tujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan dan belanja negara, termasuk melalui penggunaan teknologi informasi.

Kementerian/Lembaga yang turut berpartisipasi dalam PFM-MDTF III adalah:

1. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
2. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
4. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
5. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
6. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas
7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas

Adapun fokus utama masing-masing Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam PFM-MDTF III sebagai berikut:

1. Revenue Policy and Management
 - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
2. Expenditure Policy and Management
 - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
 - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
 - Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3. Sub-National Public Resources and Management
 - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
 - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
- 4. Digital Technology Foundations and Platforms
 - Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
- 5. Enhance Gender Equality
 - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas

F.2.3. Ikhtisar Laporan Keuangan Hibah Luar Negeri BPKP

No	URAIAN	LK PHLN
1	Nama Hibah Luar Negeri	Hibah Luar Negeri Bank Dunia Nomor TF0B5420 untuk Kegiatan <i>Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF)</i> Tahap III
2	Pemberi Hibah	<i>International Bank for Reconstruction & Development</i>
3	Nama Proyek	<i>Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project</i>
4	Grand ID	TF0B5420
5	No. Register	2FPJR4SA
6	<i>Date Sign</i>	18 Mei 2021
7	<i>Date Effective</i>	18 Mei 2021
8	<i>Closing Date</i>	30 Juni 2025
9	<i>Grand Amount</i>	USD3.259.000 (ini total di Kemenkeu)
10	<i>Disbursement</i> s.d.tahun 2023	Rp879.510.728,00
11	<i>Disbursement</i> pada tahun 2023	Rp806.981.951,00
12	Belanja Tahun 2023 (Rupiah)	Rp72.528.777,00
	a. Belanja Pegawai	Rp0,00
	b. Belanja Barang	Rp 97.200.000,00
	c. Belanja Modal	Rp709.781.951,00
	d. Belanja Bansos	Rp0,00
13	Neraca (Rupiah)	
	a. Aset Lancar	Rp0,00
	b. Aset Tetap	Rp0,00
	c. Aset Lainnya (ATB Dalam Pengerjaan)	Rp709.781.951,00
	d. Kewajiban	Rp0,00
14	<i>Executing Agency</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (636702) PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 10:55 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	22,579,755,542
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	13,810,950	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	5,000,999
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,026,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,783,951
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,725,786,700	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	63,004	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	258,639,170	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	72,159,734	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	55,220,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	721,672,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	42,088,564	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	198,213,540	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	537,198,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	48,430,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	61,868,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	9,428,708,722	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	294,300,641	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	106,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	188,382,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	150,991,925	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	457,450,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	38,059,243	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,700,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	58,215,309	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	97,200,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	108,000,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	211,967,517	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,194,124,178	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	196,875,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	235,797,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	438,097,454	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61,100,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	709,781,951	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	110
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	6,480,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	5,400,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	560,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (636702) PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 10:55 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
		Kota		
JUMLAH			22,606,006,602	22,606,006,602

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 8 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Ditandatangani secara elektronik oleh

IWAN AGUNG PRASETYO

197404141994021001



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (636702) PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 10:56 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	23,172,640	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,116,334,659	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,343,915,414
0.0	162151	Software	1,889,112,550	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	709,781,951	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,497,974,299
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	22,579,755,542
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	13,810,950	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,131,512,226
0.0	391111	Ekuitas	0	1,753,239,953
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	5,000,999
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,026,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,783,951
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,725,786,700	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	62,894	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	258,639,170	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	72,159,734	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	48,740,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	721,672,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	42,088,564	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	198,213,540	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	537,198,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	43,030,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	61,868,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	9,428,708,722	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	294,300,641	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	106,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	188,382,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	150,991,925	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	457,450,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	38,059,243	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,700,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	97,200,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	108,000,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	211,967,517	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,194,124,178	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	196,875,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	235,797,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (636702) PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 10:56 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	437,537,454	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	573,571,828	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	175,448,676	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	68,316,848	0
JUMLAH			32,320,208,384	32,320,208,384

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 8 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Ditandatangani secara elektronik oleh

IWAN AGUNG PRASETYO

197404141994021001



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 089
ESELON I : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 01
SATUAN KERJA : PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR 636702

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 08/05/24 10:56 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	13,810,950	13,810,950	0	0	42,542,159	42,542,159	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	13,810,950	13,810,950	0	0	42,542,159	42,542,159	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	13,810,950	13,810,950	0	0	42,542,159	42,542,159	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	23,583,295,000	22,579,755,542	(1,003,539,458)	96	21,450,057,000	21,072,697,131	(377,359,869)	98
1. Belanja Pegawai	16,194,388,000	16,138,167,324	(56,220,676)	100	15,250,960,000	14,985,267,913	(265,692,087)	98
2. Belanja Barang	5,812,601,000	5,670,706,267	(141,894,733)	98	4,974,956,000	4,878,800,009	(96,155,991)	98
3. Belanja Modal	1,576,306,000	770,881,951	(805,424,049)	49	1,224,141,000	1,208,629,209	(15,511,791)	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 089
ESELON I : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 01
SATUAN KERJA : PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR 636702

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 08/05/24 10:56 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	23,583,295,000	22,579,755,542	(1,003,539,458)	96	21,450,057,000	21,072,697,131	(377,359,869)	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 8 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Ditandatangani secara elektronik oleh

IWAN AGUNG PRASETYO
197404141994021001



- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSrE untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (636702) PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 08/05/24 10:57 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	23,172,640	33,274,179	(10,101,539)	(30.36)
JUMLAH ASET LANCAR	23,172,640	33,274,179	(10,101,539)	(30.36)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	7,116,334,659	5,923,722,433	1,192,612,226	20.13
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,343,915,414)	(4,770,343,586)	(573,571,828)	12.02
JUMLAH ASET TETAP	1,772,419,245	1,153,378,847	619,040,398	53.67
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,889,112,550	1,889,112,550	0	0.00
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	709,781,951	0	709,781,951	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,497,974,299)	(1,322,525,623)	(175,448,676)	13.27
JUMLAH ASET LAINNYA	1,100,920,202	566,586,927	534,333,275	94.31
JUMLAH ASET	2,896,512,087	1,753,239,953	1,143,272,134	65.21

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,896,512,087	1,753,239,953	1,143,272,134	65.21
JUMLAH EKUITAS	2,896,512,087	1,753,239,953	1,143,272,134	65.21
JUMLAH EKUITAS	2,896,512,087	1,753,239,953	1,143,272,134	65.21
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,896,512,087	1,753,239,953	1,143,272,134	65.21

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 8 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Ditandatangani secara elektronik oleh

IWAN AGUNG PRASETYO
197404141994021001



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (636702) PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 10:57 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	16,138,167,324	14,985,267,913	1,152,899,411	7.694
Beban Persediaan	68,316,848	123,312,399	(54,995,551)	(44.599)
Beban Barang dan Jasa	1,336,189,809	1,788,755,437	(452,565,628)	(25.301)
Beban Pemeliharaan	211,967,517	184,500,597	27,466,920	14.887
Beban Perjalanan Dinas	4,064,333,632	2,827,165,342	1,237,168,290	43.76
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (636702) PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 10:57 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	749,020,504	921,191,754	(172,171,250)	(18.69)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	22,567,995,634	20,830,193,442	1,737,802,192	8.343
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(22,567,995,634)	(20,830,193,442)	(1,737,802,192)	8.343
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	5,000,999	0	5,000,999	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	5,000,999	0	5,000,999	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,809,951	42,542,159	(33,732,208)	(79.291)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,809,951	42,542,159	(33,732,208)	(79.291)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	13,810,950	42,542,159	(28,731,209)	(67.536)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(22,554,184,684)	(20,787,651,283)	(1,766,533,401)	8.498
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(22,554,184,684)	(20,787,651,283)	(1,766,533,401)	8.498

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 8 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Ditandatangani secara elektronik oleh

IWAN AGUNG PRASETYO

197404141994021001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (636702) PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 10:57 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,753,239,953	2,007,898,407	(254,658,454)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(22,554,184,684)	(20,787,651,283)	(1,766,533,401)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	23,697,456,818	20,532,992,829	3,164,463,989	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,143,272,134	(254,658,454)	1,397,930,588	-
EKUITAS AKHIR	2,896,512,087	1,753,239,953	1,143,272,134	-

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 8 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Ditandatangani secara elektronik oleh

IWAN AGUNG PRASETYO

197404141994021001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**
ESELON I : 01 **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 636702 **PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 08/05/24 10:58 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	5,000,999	0	5,000,999	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	5,000,999	0	5,000,999	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,026,000	0	1,026,000	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,783,951	0	7,783,951	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	8,809,951	0	8,809,951	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	13,810,950	0	13,810,950	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	13,810,950	0	13,810,950	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SATUAN KERJA

: 089
: 636702

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/24 10:58 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,056,060,000	4,725,789,000	4,725,786,700	0	4,725,786,700	100	2,300
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100,000	64,000	63,004	110	62,894	98.27	1,106
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	350,000,000	258,642,000	258,639,170	0	258,639,170	100	2,830
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	98,000,000	72,162,000	72,159,734	0	72,159,734	100	2,266
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	139,700,000	55,220,000	55,220,000	6,480,000	48,740,000	88.27	6,480,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	707,840,000	721,672,000	721,672,000	0	721,672,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	44,000,000	42,090,000	42,088,564	0	42,088,564	100	1,436
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	234,000,000	198,214,000	198,213,540	0	198,213,540	100	460
511129	Belanja Uang Makan PNS	709,920,000	574,636,000	537,198,000	0	537,198,000	93.48	37,438,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	49,000,000	48,430,000	48,430,000	5,400,000	43,030,000	88.85	5,400,000
512211	Belanja Uang Lembur	25,272,000	62,000,000	61,868,000	0	61,868,000	99.79	132,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	9,639,412,000	9,435,469,000	9,428,708,722	0	9,428,708,722	99.93	6,760,278
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	17,053,304,000	16,194,388,000	16,150,047,434	11,880,110	16,138,167,324	99.73	56,220,676
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	294,079,000	295,726,000	294,300,641	0	294,300,641	99.52	1,425,359
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,084,000	184,000	106,000	0	106,000	57.61	78,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	200,520,000	188,382,000	188,382,000	0	188,382,000	100	0
521211	Belanja Bahan	156,790,000	105,221,000	98,797,625	0	98,797,625	93.9	6,423,375
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	514,990,000	462,900,000	457,450,000	0	457,450,000	98.82	5,450,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	121,393,000	39,907,000	38,059,243	0	38,059,243	95.37	1,847,757
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	161,256,000	59,243,000	58,215,309	0	58,215,309	98.27	1,027,691
522151	Belanja Jasa Profesi	132,900,000	56,500,000	48,800,000	0	48,800,000	86.37	7,700,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	303,178,000	214,178,000	211,967,517	0	211,967,517	98.97	2,210,483
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,649,070,000	2,306,499,000	2,294,249,319	0	2,294,249,319	99.47	12,249,681
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	458,430,000	197,100,000	196,875,000	0	196,875,000	99.89	225,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	84,760,000	100,760,000	98,347,000	0	98,347,000	97.61	2,413,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	295,000,000	342,850,000	342,833,370	560,000	342,273,370	99.83	576,630
	JUMLAH BELANJA BARANG	4,379,450,000	4,371,150,000	4,330,083,024	560,000	4,329,523,024	99.06	41,626,976
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	61,150,000	61,100,000	0	61,100,000	99.92	50,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	61,150,000	61,100,000	0	61,100,000	99.92	50,000
	JUMLAH RUPIAH MURNI	21,432,754,000	20,626,688,000	20,541,230,458	12,440,110	20,528,790,348	99.59	97,897,652
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	0	55,000,000	52,194,300	0	52,194,300	94.9	2,805,700

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
SATUAN KERJA : 636702

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 08/05/24 10:58 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522151	Belanja Jasa Profesi	0	59,800,000	59,200,000	0	59,200,000	99	600,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	900,401,000	899,874,859	0	899,874,859	99.94	526,141
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	137,450,000	137,450,000	0	137,450,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	100,000,000	95,264,084	0	95,264,084	95.26	4,735,916
	JUMLAH BELANJA BARANG	0	1,252,651,000	1,243,983,243	0	1,243,983,243	99.31	8,667,757
	JUMLAH PINJAMAN LUAR NEGERI	0	1,252,651,000	1,243,983,243	0	1,243,983,243	99.31	8,667,757
09	HIBAH LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	118,800,000	97,200,000	0	97,200,000	81.82	21,600,000
522141	Belanja Sewa	0	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	0	188,800,000	97,200,000	0	97,200,000	51.48	91,600,000
53	BELANJA MODAL							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	1,515,156,000	709,781,951	0	709,781,951	46.85	805,374,049
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	1,515,156,000	709,781,951	0	709,781,951	46.85	805,374,049
	JUMLAH HIBAH LUAR NEGERI	0	1,703,956,000	806,981,951	0	806,981,951	47.36	896,974,049
	TOTAL	21,432,754,000	23,583,295,000	22,592,195,652	12,440,110	22,579,755,542	95.8	1,003,539,458

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 089 **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**
UAKPB : 636702 **PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

Tgl.Data : 08/05/24 6:00 AM
Tgl.Cetak : 08/05/24 10:59 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	23,172,640
132111	Peralatan dan Mesin	7,116,334,659
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,343,915,414)
162151	Software	1,889,112,550
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	709,781,951
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,497,974,299)
J U M L A H		2,896,512,087

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UAKPB : 636702 PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 08/05/24 10:59 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		811	5,923,722,433	73	1,192,612,226	0	0	884	7,116,334,659
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	7	1,124,850,500	0	0	0	0	7	1,124,850,500
30501	ALAT KANTOR	-	154	527,366,719	5	28,600,000	0	0	159	555,966,719
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	317	627,775,326	1	12,500,000	0	0	318	640,275,326
30601	ALAT STUDIO	-	51	215,305,052	1	3,000,000	0	0	52	218,305,052
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	19	65,062,922	0	0	0	0	19	65,062,922
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	3	13,065,000	0	0	0	0	3	13,065,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	10	25,850,000	0	0	0	0	10	25,850,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	1	24,000,000	0	0	0	0	1	24,000,000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	6	19,470,000	0	0	0	0	6	19,470,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	1	4,484,400	0	0	0	0	1	4,484,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	1	60,060,000	0	0	0	0	1	60,060,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	129	2,054,820,866	61	1,131,512,226	0	0	190	3,186,333,092
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	112	1,161,611,648	5	17,000,000	0	0	117	1,178,611,648
TOTAL				5,923,722,433		1,192,612,226		0		7,116,334,659

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UAKPB : 636702 PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 11:00 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		93	37,986,300	2	1,700,000	0	0	95	39,686,300
30501	ALAT KANTOR	-	10	1,500,000	0	0	0	0	10	1,500,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	41	14,586,000	0	0	0	0	41	14,586,000
30601	ALAT STUDIO	-	42	21,900,300	2	1,700,000	0	0	44	23,600,300
TOTAL				37,986,300		1,700,000		0		39,686,300



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 636702
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	23,583,295,000	23,583,295,000	0
2	Belanja	22,592,195,652	22,592,195,652	0
3	Pengembalian Belanja	-12,440,110	-12,440,110	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	13,810,950	13,810,950	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 19-JAN-24

